

Dr. Drs. Aminul Amin, MM., CPA, CTA.

Buku Referensi

KEPEMILIKAN MAYORITAS *dan* EFEKTIFITAS MONITORING

Studi Tata Kelola Perusahaan Publik Indonesia



KEPEMILIKAN MAYORITAS *dan* EFEKTIFITAS MONITORING

Studi Tata Kelola Perusahaan Publik Indonesia

Dr. Drs. Aminul Amin, MM., CPA, CTA.

Penerbit Widina

KEPEMILIKAN MAYORITAS DAN EFEKTIVITAS MONITORING: STUDI TATA KELOLA PERUSAHAAN PUBLIK INDONESIA

Penulis:
Dr. Drs. Aminul Amin, MM., CPA., CTA

Desain Cover:
Andi Juliandi

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Neneng Sri Wahyuni

ISBN:
978-634-317-050-1

Cetakan Pertama:
Desember, 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Perusahaan publik Indonesia berada dalam posisi unik yang memerlukan perhatian serius terhadap tata kelolanya. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi pada pemegang saham mayoritas menciptakan dinamika tersendiri yang berbeda dari model pasar modal Anglo Saxon dengan kepemilikan tersebar. Persoalan yang muncul bukan hanya tentang pengawasan manajemen terhadap pemegang saham, melainkan juga tentang perlindungan pemegang saham minoritas dari kekuasaan yang terkonsentrasi.

Buku ini hadir dengan pemahaman bahwa kualitas tata kelola perusahaan publik tidak dapat diukur hanya dari keberadaan struktur formal seperti Dewan Komisaris, Komite Audit, atau auditor eksternal. Kualitas tata kelola harus dinilai dari efektivitas substansial organ tersebut dalam menjalankan fungsi pengawasan di tengah realitas kepemilikan mayoritas yang dominan. Laporan keuangan, sebagai instrumen komunikasi perusahaan dengan pasar, menjadi medan penting untuk melihat bagaimana monitoring bekerja dalam praktik.

Pentingnya monitoring efektif terletak pada dampaknya terhadap kredibilitas informasi akuntansi. Ketika monitoring berjalan dengan baik, laporan keuangan lebih dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Ketika monitoring lemah, pasar menghadapi ketidakpastian yang lebih besar dan risiko keputusan yang keliru. Dalam konteks ini, perlindungan investor bukan hanya persoalan perlindungan hukum, melainkan juga persoalan kualitas pengawasan atas proses pelaporan keuangan.

Penelitian yang disajikan dalam buku ini bertujuan untuk membuka wacana lebih dalam tentang hubungan antara kepemilikan mayoritas dan efektivitas monitoring dalam perusahaan publik Indonesia. Penulis berharap bahwa buku ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang tata kelola perusahaan publik, terutama dalam konteks struktur kepemilikan yang khas di Indonesia. Pemahaman ini diharapkan dapat membantu praktisi, regulator, investor, dan akademisi dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan publik.

Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung penyelesaian buku ini. Semoga pembaca dapat memperoleh manfaat dari penjelasan dan analisis yang disajikan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
BAB 1 LANSKAP TATA KELOLA PERUSAHAAN PUBLIK INDONESIA 1
A. Dinamika Perusahaan Publik dan Kebutuhan Tata Kelola 1
B. Kepemilikan Mayoritas Sebagai Ciri Khas Pasar Modal Indonesia 7
C. Urgensi Monitoring Dalam Menjaga Kualitas Pelaporan Keuangan 13
BAB 2 FONDASI TEORETIS KEPEMILIKAN DAN MONITORING 19
A. Teori Agensi Dan Konflik Kepentingan Dalam Perusahaan Publik 19
B. Agency Problem Tipe I Dan Tipe II Dalam Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi 25
C. Konsep Bundle of Governance Dalam Mekanisme Pengawasan 32
D. Efektivitas Monitoring Sebagai Isu Sentral Tata Kelola 38
BAB 3 KEPEMILIKAN MAYORITAS DAN KEKUATAN PENGENDALIAN 45
A. Definisi Kepemilikan Mayoritas dan Kepemilikan Terkonsentrasi 45
B. Hak Kontrol, Hak Arus Kas, dan Pengaruh Terhadap Keputusan Perusahaan 52
C. Efek Alignment dan Entrenchment Dalam Perusahaan Publik 59
BAB 4 DEWAN KOMISARIS SEBAGAI MEKANISME MONITORING INTERNAL 67
A. Peran Dewan Komisaris Dalam Sistem Tata Kelola Indonesia 67
B. Independensi Dewan Komisaris dan Kualitas Pengawasan 73
C. Keahlian, Ukuran, dan Frekuensi Rapat Dewan Komisaris..... 78
D. Keterbatasan Dewan Komisaris Dalam Lingkungan Kepemilikan Mayoritas 83
BAB 5 KOMITE AUDIT DAN PENGAWASAN PELAPORAN KEUANGAN 89
A. Fungsi Komite Audit Dalam Menjaga Kualitas Laporan Keuangan..... 89
B. Independensi Komite Audit dan Pengendalian Manajemen Laba 95
C. Efektivitas Komite Audit di Bawah Tekanan Pemegang Saham Pengendali 100

BAB 6 AUDITOR EKSTERNAL DAN KUALITAS AUDIT 107
A. Auditor Sebagai Mekanisme Monitoring Eksternal 107
B. Kualitas Audit, Spesialisasi Industri, dan Reputasi Auditor 113
C. Interaksi Auditor Dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit 118
D. Auditor Sebagai Penguat Atau Pengganti Mekanisme Governance Internal 123
BAB 7 KUALITAS LABA SEBAGAI INDIKATOR EFEKTIVITAS MONITORING 135
A. Konsep Kualitas Laba Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi .. 135
B. Manajemen Laba Oportunistik dan Risiko Informasi Bagi Investor 140
C. Diskresi Akrual Sebagai Proksi Kualitas Laba 145
BAB 8 KEPEMILIKAN MAYORITAS DAN PELEMAHAN MONITORING 151
A. Kontrol Pemegang Saham Mayoritas Terhadap Manajemen 151
B. Pengaruh Kepemilikan di Atas 50% Terhadap Fungsi Pengawasan 156
C. Potensi Ekspropriasi Terhadap Pemegang Saham Minoritas..... 162
D. Pelemahan Independensi Organ Tata Kelola Perusahaan 167
BAB 9 TATA KELOLA, RATING GOVERNANCE, DAN NILAI PERUSAHAAN 173
A. Good Corporate Governance Sebagai Sinyal Bagi Investor 173
B. Rating Tata Kelola dan Persepsi Pasar Terhadap Perusahaan Publik 177
C. Hubungan Kualitas Laba, Tata Kelola, dan Nilai Perusahaan 181
D. Metode Pengukuran Tata Kelola dan Nilai Perusahaan..... 184
BAB 10 MODEL MONITORING PADA PERUSAHAAN DENGAN KEPEMILIKAN TERKONSENTRASI..... 189
A. Model Interaksi Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Auditor..... 189
B. Moderasi Kualitas Audit Dalam Hubungan Governance dan Kualitas Laba..... 193
C. Sub-Sampel Kepemilikan: Kurang Dari 20%, 20–50%, Lebih Dari 50%, dan Lebih Dari 80%..... 196
D. Penafsiran Efektivitas Monitoring Pada Berbagai Tingkat Konsentrasi Kepemilikan 199

BAB 11 IMPLIKASI REGULASI DAN PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS 203
A. Kebutuhan Transparansi Struktur Kepemilikan Utama 203
B. Pengungkapan Ultimate Shareholders dan Struktur Piramida Kepemilikan 207
C. Penguatan Regulasi Untuk Mencegah Ekspropriasi dan Tunneling 212
BAB 12 REKONSTRUKSI TATA KELOLA PERUSAHAAN PUBLIK INDONESIA 217
A. Menuju Model Tata Kelola Yang Kontekstual Bagi Indonesia..... 217
B. Integrasi Mekanisme Internal dan Eksternal Dalam Monitoring..... 222
C. Agenda Penelitian Lanjutan Tentang Kepemilikan Mayoritas dan Kualitas Laba 227
D. Kesimpulan: Efektivitas Monitoring Dalam Bayang-Bayang Pemegang Saham Pengendali 231
PENUTUP.....237
DAFTAR PUSTAKA.....239

BAB 1

LANSKAP TATA KELOLA PERUSAHAAN PUBLIK INDONESIA

A. DINAMIKA PERUSAHAAN PUBLIK DAN KEBUTUHAN TATA KELOLA

Perusahaan publik lahir dari perubahan mendasar dalam cara sebuah entitas bisnis memperoleh modal, mempertanggungjawabkan keputusan, dan membangun kepercayaan di hadapan masyarakat. Ketika sebuah perusahaan memasuki pasar modal, relasinya tidak lagi terbatas pada pemilik lama dan manajemen yang menjalankan operasi harian. Status publik membuat perusahaan berhadapan dengan investor, kreditur, regulator, karyawan, analis, media, dan masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap informasi perusahaan. Amin, Arniati, dan Puspita (2020) menempatkan corporate governance sebagai instrumen penting karena nilai perusahaan dibaca oleh pasar melalui kualitas pengelolaan, pengungkapan, dan perlindungan terhadap pemegang saham. Dalam konteks ini, perusahaan publik harus dipahami sebagai institusi ekonomi yang bekerja di bawah pengawasan sosial dan regulatif yang lebih luas. Keputusan manajemen tidak hanya dinilai dari pencapaian laba, tetapi juga dari cara laba itu diperoleh, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi menjadi syarat utama karena investor tidak berada di dalam perusahaan dan hanya dapat menilai perusahaan melalui laporan yang tersedia. Oleh karena itu, kebutuhan tata kelola muncul sebagai jawaban terhadap jarak informasi antara pihak yang mengelola perusahaan dan pihak yang menanamkan modalnya.

Perubahan perusahaan dari entitas tertutup menjadi perusahaan publik membawa konsekuensi baru yang tidak ringan. Dalam perusahaan tertutup, pemilik biasanya memiliki akses lebih langsung terhadap keputusan dan kondisi internal perusahaan. Setelah menjadi perusahaan publik, akses itu berubah karena sebagian pemegang saham hanya memiliki informasi

BAB 2

FONDASI TEORETIS KEPEMILIKAN DAN MONITORING

A. TEORI AGENSI DAN KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PERUSAHAAN PUBLIK

Teori agensi menjadi fondasi utama untuk memahami mengapa perusahaan publik membutuhkan pengawasan, kontrak, audit, dan tata kelola. Dalam hubungan keagenan, Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa pemilik sebagai prinsipal mendelegasikan kewenangan pengelolaan kepada manajemen sebagai agen. Pendelegasian tersebut diperlukan karena pemilik tidak selalu memiliki waktu, keahlian, dan kapasitas operasional untuk menjalankan perusahaan secara langsung. Namun, pendelegasian kewenangan juga membuka ruang perbedaan kepentingan antara pihak yang memiliki modal dan pihak yang mengelola modal. Manajemen dapat memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi perusahaan dibandingkan pemilik. Keunggulan informasi tersebut memungkinkan manajemen mengambil keputusan yang tidak selalu sepenuhnya sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Pada titik inilah teori agensi memberikan dasar untuk memahami mengapa konflik kepentingan tidak dapat diabaikan dalam perusahaan publik. Konflik tersebut bukan sekadar persoalan moral pribadi, tetapi merupakan konsekuensi struktural dari pemisahan kepemilikan dan pengendalian.

Perusahaan publik memperbesar kompleksitas hubungan keagenan karena pemilik tidak lagi terbatas pada satu orang atau satu keluarga. Pemegang saham dapat berjumlah sangat banyak, tersebar di berbagai wilayah, dan memiliki tingkat akses informasi yang berbeda. Dalam kondisi seperti itu, manajemen berada pada posisi strategis karena menguasai informasi operasional, informasi keuangan, dan informasi mengenai prospek perusahaan. Amin (2017) menegaskan bahwa teori agensi dalam konteks corporate governance digunakan untuk menjelaskan hubungan

BAB 3

KEPEMILIKAN MAYORITAS DAN KEKUATAN PENGENDALIAN

A. DEFINISI KEPEMILIKAN MAYORITAS DAN KEPEMILIKAN TERKONSENTRASI

Gambar 3.1 Model Struktur Kepemilikan Piramida



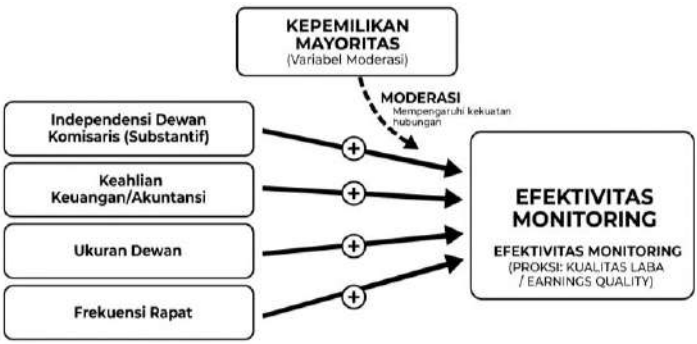
Implikasi Pemisahan Hak Kontrol dan Hak Arus Kas dalam Struktur Piramida

- Hak Kontrol: mengikuti rantai kepemilikan dengan ambang minimum (weakest-link rule)
- Hak Arus Kas: dihitung melalui perkalian bertingkat sepanjang rantai kepemilikan
- Semakin panjang rantai piramida → semakin besar deviasi Hak Kontrol vs. Hak Arus Kas
- Deviasi besar → insentif ekspropriast terhadap pemegang saham minoritas meningkat
- Transparansi ultimate shareholder diperlukan untuk membaca risiko pengendalian yang sesungguhnya

BAB 4

DEWAN KOMISARIS SEBAGAI MEKANISME MONITORING INTERNAL

A. PERAN DEWAN KOMISARIS DALAM SISTEM TATA KELOLA INDONESIA

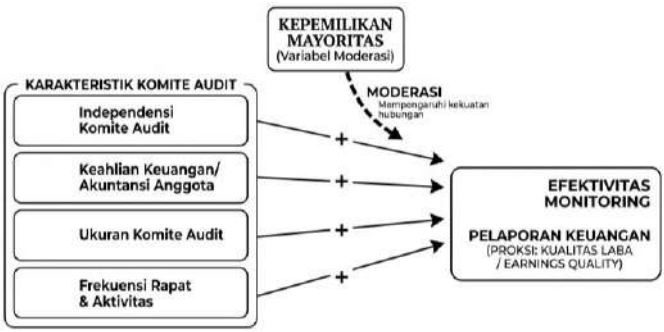


Dewan Komisaris memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem tata kelola perusahaan publik Indonesia karena sistem hukum korporasi Indonesia mengenal pemisahan antara organ pengurusan dan organ pengawasan. Dalam kerangka ini, Direksi menjalankan pengurusan perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK Nomor 33/POJK.04/2014 menempatkan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai organ utama emiten atau perusahaan publik, sehingga keberadaan Dewan Komisaris bukan sekadar pelengkap struktural, tetapi bagian dari mekanisme hukum untuk memastikan perusahaan dikelola secara bertanggung jawab (OJK, 2014). Posisi ini membuat Dewan Komisaris berada pada titik temu antara kepentingan pemegang saham, kepentingan perusahaan, dan kepentingan pasar modal. Dewan Komisaris tidak

BAB 5

KOMITE AUDIT DAN PENGAWASAN PELAPORAN KEUANGAN

A. FUNGSI KOMITE AUDIT DALAM MENJAGA KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

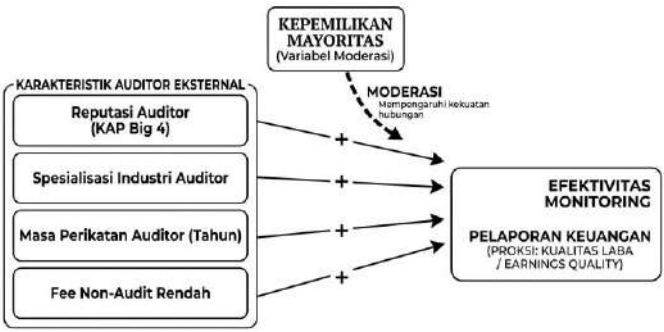


Komite Audit merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang memiliki posisi penting dalam menjaga kualitas laporan keuangan perusahaan publik. Kehadirannya diperlukan karena Dewan Komisaris tidak selalu dapat menelaah seluruh rincian teknis pelaporan keuangan, proses audit, pengendalian internal, dan kepatuhan secara langsung. Dalam struktur tata kelola Indonesia, Komite Audit membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan secara lebih fokus, terutama pada area yang berhubungan dengan angka akuntansi dan risiko salah saji. OJK (2015) melalui POJK 55 Tahun 2015 menegaskan bahwa pengaturan Komite Audit berkaitan dengan pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit pada emiten atau perusahaan publik. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa Komite Audit bukan sekadar komite pilihan, melainkan bagian dari infrastruktur regulatif pasar modal. Komite Audit hadir untuk memperkuat proses akuntabilitas, bukan untuk menggantikan tanggung jawab Dewan

BAB 6

AUDITOR EKSTERNAL DAN KUALITAS AUDIT

A. AUDITOR SEBAGAI MEKANISME MONITORING EKSTERNAL

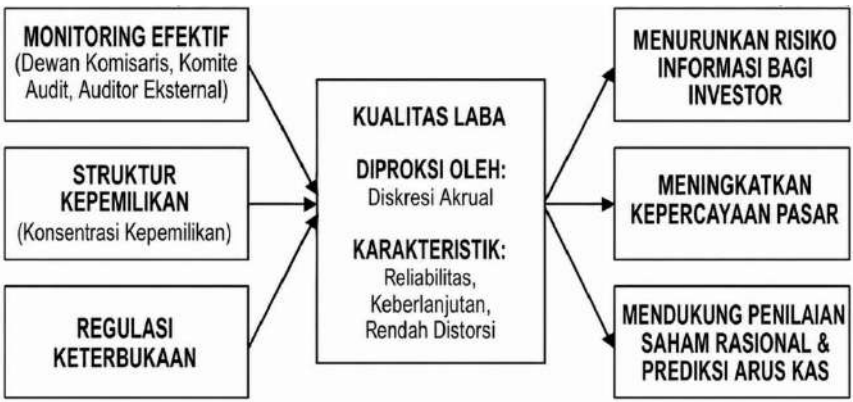


Auditor eksternal menempati posisi penting dalam tata kelola perusahaan publik karena ia hadir sebagai pihak independen yang memberikan assurance atas kewajaran laporan keuangan. Dalam hubungan keagenan, laporan keuangan disusun oleh manajemen, tetapi digunakan oleh pemegang saham, kreditur, regulator, dan pasar untuk menilai kinerja perusahaan. Kondisi ini menciptakan kebutuhan terhadap pihak luar yang mampu memeriksa apakah informasi yang disajikan manajemen telah memenuhi standar akuntansi. Amin (2016) menegaskan bahwa auditor merupakan mekanisme monitoring eksternal yang bertugas memastikan informasi keuangan telah memenuhi standar akuntansi dan dapat meningkatkan efektivitas pengendalian internal melalui koordinasi dengan audit internal serta komite audit. Auditor tidak menggantikan tanggung jawab manajemen dalam menyusun laporan keuangan, tetapi ia memberi penilaian profesional atas kewajaran informasi yang disajikan. Peran tersebut penting karena investor publik tidak memiliki akses langsung untuk memeriksa catatan transaksi perusahaan. Audit kemudian menjadi

BAB 7

KUALITAS LABA SEBAGAI INDIKATOR EFEKTIVITAS MONITORING

A. KONSEP KUALITAS LABA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN EKONOMI



Kualitas laba merupakan salah satu ukuran penting untuk menilai apakah mekanisme monitoring perusahaan bekerja secara efektif. Laba tidak cukup dipahami sebagai angka akhir dalam laporan laba rugi, karena angka tersebut harus dibaca bersama proses pembentukan, keberlanjutan, dan kemampuannya merepresentasikan kinerja ekonomi perusahaan. Amin (2017) menempatkan laba sebagai informasi penting bagi investor dalam mengekspektasi kinerja saham, sekaligus menegaskan bahwa kualitas laba menjadi persoalan ketika laba tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Dalam konteks perusahaan publik, investor menggunakan laba untuk menilai prospek, risiko, efisiensi manajemen, dan kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas masa depan. Laba yang tinggi memang dapat menarik perhatian pasar, tetapi laba yang tinggi tidak

BAB 8

KEPEMILIKAN MAYORITAS DAN PELEMAHAN MONITORING

A. KONTROL PEMEGANG SAHAM MAYORITAS TERHADAP MANAJEMEN

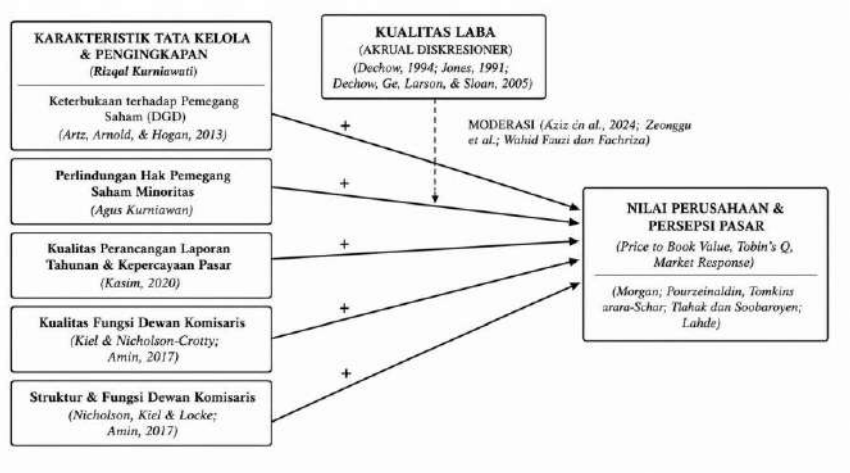


Kontrol pemegang saham mayoritas terhadap manajemen merupakan salah satu ciri utama perusahaan publik dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi. Dalam struktur seperti ini, pemilik mayoritas tidak hanya memiliki klaim ekonomi atas laba dan dividen, tetapi juga memiliki kemampuan nyata untuk memengaruhi arah perusahaan. Amin, Djuminah, Suhardjanto, dan Agustiningsih (2017) menjelaskan bahwa pemegang saham besar dalam perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi memiliki kontrol yang luas sampai pada tingkat manajemen dan dapat memberi insentif untuk melakukan ekspropriasi. Jalur kontrol tersebut dapat bekerja melalui pengangkatan direksi, penentuan komisaris, pemilihan auditor, penyusunan agenda RUPS, transaksi strategis, dan kebijakan pelaporan keuangan. Dalam keadaan tertentu, kontrol semacam

BAB 9

TATA KELOLA, RATING GOVERNANCE, DAN NILAI PERUSAHAAN

A. GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI SINYAL BAGI INVESTOR

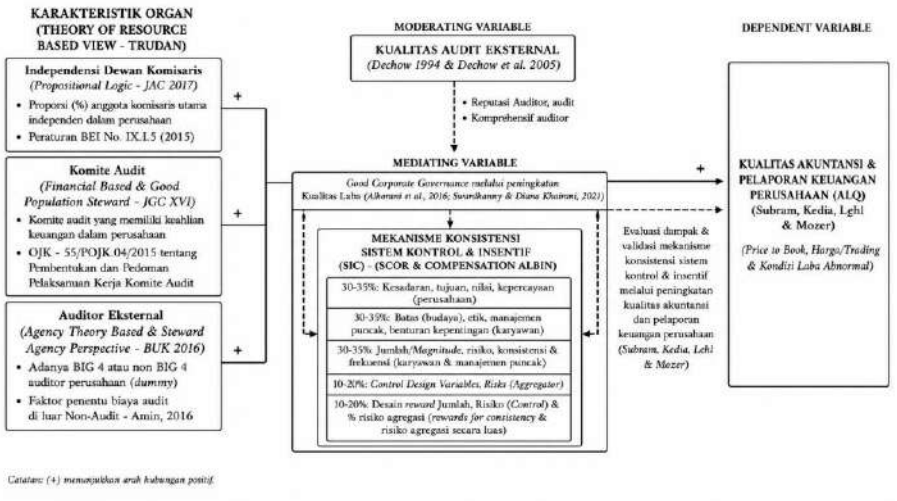


Good Corporate Governance atau GCG dapat dipahami sebagai bahasa kepercayaan yang dibaca investor sebelum mereka menilai prospek perusahaan secara lebih jauh. Dalam pasar modal, investor tidak hanya memperhatikan laba, aset, dividen, atau harga saham, tetapi juga membaca bagaimana perusahaan dikendalikan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Amin, Arniati, dan Puspita (2020) menjelaskan bahwa GCG merupakan prinsip yang mendasari metode dan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta etika bisnis. Prinsip tersebut mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran sebagai dasar pembentukan kepercayaan pasar. Bagi investor, kelima prinsip itu menjadi sinyal bahwa perusahaan

BAB 10

MODEL MONITORING PADA PERUSAHAAN DENGAN KEPEMILIKAN TERKONSENTRASI

A. MODEL INTERAKSI DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT, DAN AUDITOR



Model monitoring pada perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi perlu dibangun dari pemahaman bahwa pengawasan tidak bekerja melalui satu organ saja. Dewan Komisaris, Komite Audit, dan auditor eksternal memiliki peran berbeda, tetapi ketiganya bertemu pada tujuan yang sama, yaitu menjaga agar laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara wajar. Dalam disertasi Amin (2017), kualitas auditor ditempatkan sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan karakteristik Dewan Komisaris dan kualitas laba, sehingga pengawasan dipahami sebagai hubungan antarorgan yang saling menguatkan, bukan sekadar fungsi yang

BAB 11

IMPLIKASI REGULASI DAN PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS

A. KEBUTUHAN TRANSPARANSI STRUKTUR KEPEMILIKAN UTAMA

Transparansi struktur kepemilikan utama merupakan kebutuhan mendasar dalam tata kelola perusahaan publik yang memiliki kepemilikan terkonsentrasi. Investor tidak cukup hanya mengetahui nama pemegang saham yang tercantum langsung dalam laporan tahunan, karena daftar tersebut sering hanya menunjukkan pemilik permukaan. Amin (2016) menegaskan bahwa pengungkapan struktur kepemilikan pemilik utama atau ultimate shareholders perlu diperluas agar masyarakat dapat mengetahui siapa pengendali sesungguhnya, termasuk hak kontrol dan hak aliran kasnya. Tanpa informasi tersebut, investor sulit menilai apakah keputusan perusahaan dipengaruhi oleh kepentingan pengendali akhir. Dalam perusahaan publik, informasi kepemilikan bukan sekadar data administratif, melainkan peta kekuasaan. Peta tersebut membantu investor membaca siapa yang memiliki kemampuan menentukan arah perusahaan, memengaruhi manajemen, dan mengarahkan transaksi strategis.

Kebutuhan transparansi menjadi semakin penting karena perusahaan publik Indonesia banyak berada dalam struktur kepemilikan yang tidak sepenuhnya tersebar. Perusahaan dapat tampak dimiliki oleh beberapa badan hukum, tetapi badan hukum tersebut mungkin berada dalam satu jaringan kelompok usaha atau keluarga pengendali. Dalam keadaan seperti ini, investor minoritas dapat keliru menilai tingkat penyebaran kepemilikan. Mereka mungkin mengira perusahaan memiliki banyak pemegang saham besar yang saling menyeimbangkan, padahal pengendalian akhirnya berada pada pihak yang sama. Ketidakjelasan ini membuat risiko konflik kepentingan lebih sulit dibaca. Transparansi kepemilikan membantu pasar melihat hubungan antara pemegang saham langsung dan pengendali akhir.

BAB 12

REKONSTRUKSI TATA KELOLA PERUSAHAAN PUBLIK INDONESIA

A. MENUJU MODEL TATA KELOLA YANG KONTEKSTUAL BAGI INDONESIA

Gambar 12.1 Model Rekonstruksi Tata Kelola Perusahaan Publik Indonesia

Integrasi Konteks Kepemilikan Mayoritas dalam Sistem Monitoring Efektif



Sumber: Diolah dari Amin (2016, 2017); Amin, Arniati & Puspita (2020)

DAFTAR PUSTAKA

Agustiningsih, S. W., Djuminah, Suhardjanto, D., Rahmawati, & Amin, A. (2020). Independent board, earnings management, and audit quality. Test Engineering & Management, 82, 5035–5045.

Al-Ahdal, W. M., Alsamhi, M. H., Tabash, M. I., & Farhan, N. H. S. (2020). The impact of corporate governance on financial performance of Indian and GCC listed firms: An empirical investigation. Research in International Business and Finance, 51, 101083.

Alzoubi, E. S. S. (2018). Audit quality, debt financing, and earnings management: Evidence from Jordan. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 30, 69–84.

Amin, A. (2016). Independensi komite audit, kualitas audit dan kualitas laba: Bukti empiris perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 18(1), 1–14. https://doi.org/10.9744/jak.18.1.1-14

Amin, A. (2017). Karakteristik Dewan Komisaris dan kualitas laba: Kualitas auditor sebagai pemoderasi [Disertasi doktoral, Universitas Sebelas Maret].

Amin, A., Arniati, T., & Puspita, D. A. (2020). How the corporate governance ratings affect the firm value: Empirical evidence from the Indonesia Stock Exchange. RJOAS, 2(98), 37–48.

Amin, A., Djuminah, Suhardjanto, D., & Agustiningsih, S. W. (2017). Board-auditor interaction and earnings management: The model of company with concentrated ownership. Review of Integrative Business and Economics Research, 6(3), 217–233.

Arniati, T., Puspita, D. A., Amin, A., & Pirzada, K. (2019). The implementation of good corporate governance model and auditor independence in earnings quality improvement. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 7(1), 188–199.

Balsam, S., Krishnan, J., & Yang, J. S. (2003). Auditor industry specialization and earnings quality. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 22(2), 71–97.

Barth, M. E., Cram, D. P., & Nelson, K. K. (2001). Accruals and the prediction of future cash flows. The Accounting Review, 76(1), 27–58.

Bebchuk, L. A., Cohen, A., & Ferrell, A. (2009). What matters in corporate governance? The Review of Financial Studies, 22(2), 783–827.

Becker, C. L., DeFond, M. L., Jiambalvo, J., & Subramanyam, K. R. (1998). The effect of audit quality on earnings management. Contemporary Accounting Research, 15(1), 1–24.

Bispo, O. N. A. (2021). Standard Jones and Modified Jones: An earnings management tutorial. Revista de Administração Contemporânea, 25(6), 1–18.

Bounini, N., & Gana, M. R. (2020). Corporate governance quality, ownership structure, agency costs and firm performance: Evidence from an emerging economy. Journal of Risk and Financial Management, 13(7), 154.

Chan, K., Chan, L. K. C., Jegadeesh, N., & Lakonishok, J. (2004). Earnings quality and stock returns. The Journal of Business, 79(3), 1041–1082.

Chen, Y., Ke, B., & Yang, Z. (2022). Controlling shareholder's ownership, control rights and related-party transactions: Analysis of regulatory effects based on board characteristics. International Entrepreneurship and Management Journal. https://doi.org/10.1007/s11365-022-00801-w

Claessens, S., Djankov, S., Fan, J. P. H., & Lang, L. H. P. (2002). Disentangling the incentive and entrenchment effects of large shareholdings. The Journal of Finance, 57(6), 2741–2771.

Claessens, S., & Yurtoglu, B. B. (2013). Corporate governance in emerging markets: A survey. Emerging Markets Review, 15, 1–33.

DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. Journal of Accounting and Economics, 3(3), 183–199.

Dechow, P., Ge, W., & Schrand, C. (2010). Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences. Journal of Accounting and Economics, 50(2–3), 344–401.

Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1995). Detecting earnings management. The Accounting Review, 70(2), 193–225.

Demsetz, H., & Lehn, K. (1985). The structure of corporate ownership: Causes and consequences. Journal of Political Economy, 93(6), 1155–1177.

Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2008). The law and economics of self-dealing. Journal of Financial Economics, 88(3), 430–465.

Eccles, R. G., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014). The impact of corporate sustainability on organizational processes and performance. Management Science, 60(11), 2835–2857.

Faccio, M., & Lang, L. H. P. (2002). The ultimate ownership of Western European corporations. Journal of Financial Economics, 65(3), 365–395.

Fan, J. P. H., & Wong, T. J. (2002). Corporate ownership structure and the informativeness of accounting earnings in East Asia. Journal of Accounting and Economics, 33(3), 401–425.

Fan, J. P. H., & Wong, T. J. (2005). Do auditors play a corporate governance role in emerging markets? Evidence from East Asia. Journal of Accounting Research, 43(1), 35–72.

Farooq, O., & El Jai, H. (2012). Ownership structure and earnings management: Evidence from the Casablanca Stock Exchange. International Research Journal of Finance and Economics, 84, 95–104.

Francis, J., LaFond, R., Olsson, P., & Schipper, K. (2005). The market pricing of accruals quality. Journal of Accounting and Economics, 39(2), 295–327.

Gompers, P., Ishii, J., & Metrick, A. (2003). Corporate governance and equity prices. The Quarterly Journal of Economics, 118(1), 107–156.

Graham, J. R., Harvey, C. R., & Rajgopal, S. (2005). The economic implications of corporate financial reporting. Journal of Accounting and Economics, 40(1–3), 3–73.

Habib, A. (2004). Impact of earnings management on value relevance of accounting information: Empirical evidence from Japan. Managerial Finance, 30(11), 1–15.

Hasan, M. S., Omar, N., & Hossain, S. Z. (2015). Corporate governance and earnings management: Evidence from listed non-financial companies in Bangladesh. International Journal of Accounting and Financial Reporting, 5(1), 92–108.

Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. Accounting Horizons, 13(4), 365–383.

Huyghebaert, N., & Wang, L. (2012). Expropriation of minority investors in Chinese listed firms: The role of internal and external corporate governance mechanisms. Corporate Governance: An International Review, 20(3), 308–332.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2013). PSAK 65: Laporan keuangan konsolidasian. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Publik Indonesia. (2021). Standar Audit 315 (Revisi 2021): Pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. IAPI.

Ikatan Akuntan Publik Indonesia. (2021). Standar Audit 540: Audit atas estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait. IAPI.

International Finance Corporation. (2014). The Indonesia Corporate Governance Manual. International Finance Corporation.

International Finance Corporation. (2018). Indonesia Corporate Governance Manual (2nd ed.). IFC.

Jaya, T. E., Septiarini, T., & Arafat, Y. (2016). Educational background of the board of commissioners, leverage, profitability and voluntary disclosure. Review of Integrative Business and Economics Research, 5(2), 260–271.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.

Johnson, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2000). Tunneling. American Economic Review, 90(2), 22–27.

Jones, J. J. (1991). Earnings management during import relief investigations. Journal of Accounting Research, 29(2), 193–228.

Klein, A. (2002). Audit committee, board of director characteristics, and earnings management. Journal of Accounting and Economics, 33(3), 375–400.

Kothari, S. P., Leone, A. J., & Wasley, C. E. (2005). Performance matched discretionary accrual measures. Journal of Accounting and Economics, 39(1), 163–197.

Kyere, M., & Ausloos, M. (2021). Corporate governance and firms financial performance in the United Kingdom. International Journal of Finance & Economics, 26(2), 1871–1885. https://doi.org/10.1002/ijfe.1883

La Porta, R., Lopez de Silanes, F., & Shleifer, A. (1999). Corporate ownership around the world. The Journal of Finance, 54(2), 471–517.

Lakshan, A. M. I., & Wijekoon, W. M. H. N. (2012). Corporate governance and corporate failure. Procedia Economics and Finance, 2, 191–198.

Lin, S., Pizzini, M., Vargus, M., & Bardhan, I. (2011). The role of the internal audit function in the disclosure of material weaknesses. The Accounting Review, 86(1), 287–323.

Lukviarman, N. (2016). Corporate governance: Menuju penguatan konseptual dan implementasi di Indonesia. Era Adicitra Intermedia.

Mahrani, M., & Soewarno, N. (2018). The effect of good corporate governance mechanism and corporate social responsibility on financial performance with earnings management as mediating variable. Asian Journal of Accounting Research, 3(1), 41–60.

Manita, R., Elommal, N., Baudier, P., & Hikkerova, L. (2020). The digital transformation of external audit and its impact on corporate governance. Technological Forecasting and Social Change, 150, 119751.

OECD. (2015). G20/OECD Principles of Corporate Governance. OECD Publishing.

Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Otoritas Jasa Keuangan.

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pemerintah Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Pemerintah Republik Indonesia.

Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A survey of corporate governance. The Journal of Finance, 52(2), 737–783.

Sloan, R. G. (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings? The Accounting Review, 71(3), 289–315.

Srinidhi, B., Gul, F. A., & Tsui, J. (2011). Female directors and earnings quality. Contemporary Accounting Research, 28(5), 1610–1644.

Velury, U., & Jenkins, D. S. (2006). Institutional ownership and the quality of earnings. Journal of Business Research, 59(9), 1043–1051.

Xie, B., Davidson, W. N., III, & DaDalt, P. J. (2003). Earnings management and corporate governance: The role of the board and the audit committee. Journal of Corporate Finance, 9(3), 295–316.

Yeh, Y. H. (2001). Corporate governance and financing methods. Journal of International Financial Management & Accounting, 12(2), 150–169.

Buku ini membahas secara mendalam bagaimana struktur kepemilikan yang terkonsentrasi membentuk wajah tata kelola perusahaan publik di Indonesia. Di tengah dominasi pemegang saham mayoritas, mekanisme pengawasan seperti Dewan Komisaris, Komite Audit, dan auditor eksternal tidak selalu bekerja dalam ruang yang netral; efektivitasnya dapat menguat, tetapi juga dapat melemah ketika berada di bawah bayang-bayang kekuatan pengendali. Dengan mengaitkan teori agensi, konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, kualitas audit, kualitas laba, serta nilai perusahaan, buku ini menawarkan pemahaman yang kontekstual tentang tantangan governance di pasar modal Indonesia.

Tidak hanya menyoroti risiko manajemen laba, ekspropriasi, tunneling, dan pelemahan independensi organ pengawasan, buku ini juga mengedarkan refleksi penting mengenai perlunya regulasi yang lebih kuat, transparansi kepemilikan, serta perlindungan yang lebih adil bagi pemegang saham minoritas. Karya ini menjadi bacaan penting bagi akademisi, peneliti, regulator, praktisi pasar modal, dan siapa pun yang ingin memahami bahwa tata kelola perusahaan bukan sekadar kepatuhan formal, melainkan perjuangan menjaga akuntabilitas, kepercayaan investor, dan keberlanjutan perusahaan publik di Indonesia.



Dr. Drs. Aminul Amin, MM., CPA, CTA. lahir di Jombang, 7 Maret 1963. Penulis adalah seorang akademisi, peneliti, dan prakatisi bidang akuntansi, keuangan, auditing dan perpajakan. Penulis bekerja di STIE Malangkucecwara (ABM) Malang sebagai dosen tetap jurusan/program studi akuntansi. Jabatan strutural sebagai Direktur Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) dan CPA Test Center STIE Malangkucecwara/ABM Malang. Penulis menyelesaikan studi S1 Jurusan Adminstrasi Bisnis, S1 Jurusan Akuntansi, S2 Jurusan Magister Manajemen (Keuangan), S3 Jurusan Akuntansi (Keuangan). Penulis pernah menempuh pendidikan profesi penilai bisnis dan profesi akuntan publik yang bergelar CPA. Selain sebagai dosen, penulis aktif menulis artikel di beberapa jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional. Penulis juga aktif sebagai konsultan individu bidang akuntansi, keuangan, perpajakan, pengelolaan aset, dan investasi di beberapa entitas bisnis dan pemerintah daerah.

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

SCANME

Bisnis & Kewirausahaan

ISBN 978-634-317-050-1

9 786343 170501